

HARMONISASI KEBIJAKAN PERBURUHAN DAN REGULASI INVESTASI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (DAMPAKNYA TERHADAP DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DALAM JANGKA PENDEK DAN PANJANG)

Alifya Putri Azahra¹, Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak², Muhammad Hanif Abdurrahman³, Farahdinny Siswajanthi⁴

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia ^{1,2,3,4}
Alamat e-mail : alifyaazahra15@gmail.com ¹, angelicasimanjuntak29@gmail.com ², hanifbdrhmn05@gmail.com ³, farahdinny@unpak.ac.id ⁴

ABSTRACT

This study discusses the long-term impact of harmonizing labor policies and investment regulations in the Job Creation Law on Indonesia's competitiveness and economic sustainability. The policy aims to improve the investment climate and enhance Indonesia's economic competitiveness through simplified licensing and labor flexibility. However, its long-term effects need careful consideration, given the potential risks to the environment and social welfare. This research uses a normative legal approach to analyze the regulations within the Job Creation Law and their impact on the economic sector. The findings suggest that the policy can improve Indonesia's competitiveness in the global market and accelerate infrastructure development, but it must be accompanied by policies that protect workers' rights and environmental sustainability to ensure long-term economic sustainability.

Keywords : Policy harmonization, labor, investment regulations, Job Creation Law, competitiveness, economic sustainability, investment, labor policy, social policy, economic growth.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak jangka panjang dari harmonisasi kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap daya saing dan keberlanjutan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia melalui penyederhanaan perizinan dan fleksibilitas ketenagakerjaan. Namun, dampak jangka panjangnya perlu dipertimbangkan dengan cermat, mengingat potensi risiko terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya terhadap sektor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan mempercepat pembangunan infrastruktur, namun harus diimbangi dengan kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja serta kelestarian lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci : *Harmonisasi kebijakan, perburuhan, regulasi investasi, Undang-Undang Cipta Kerja, daya saing, keberlanjutan ekonomi, investasi, ketenagakerjaan, kebijakan sosial, pertumbuhan ekonomi.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan istilah "Omnibus Law," telah menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang kontroversial namun penting dalam upaya memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.¹ Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia, baik dalam sektor perekonomian maupun ketenagakerjaan. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, mengalami dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang, terutama terkait dengan pengangguran, ketimpangan ekonomi, serta kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Dalam konteks ini, Undang-Undang Cipta Kerja hadir dengan tujuan untuk menciptakan kemudahan berusaha, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang bagi investasi, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki peran sentral dalam membentuk struktur perekonomian nasional. Dalam sektor perburuhan, terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja, ketentuan upah minimum, dan sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini bertujuan untuk mengurangi hambatan bagi para pengusaha dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ini juga menyentuh aspek regulasi investasi, dengan menciptakan berbagai kemudahan administrasi dan penyederhanaan perizinan yang dianggap akan meningkatkan aliran investasi ke Indonesia. Namun, di balik niat baik untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, Undang-Undang Cipta Kerja memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama dari kalangan buruh dan organisasi yang mewakili kepentingan pekerja. Perubahan dalam ketentuan perburuhan dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk pelemahan hak-hak buruh, sementara sektor pengusaha menganggapnya sebagai langkah yang diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana harmonisasi kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat berpengaruh terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Kebijakan Perburuhan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Salah satu elemen utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah perubahan pada regulasi ketenagakerjaan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas yang lebih besar di pasar tenaga kerja, dengan harapan akan mempermudah perusahaan dalam merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja. Beberapa aspek utama yang disorot dalam kebijakan perburuhan ini termasuk penyederhanaan sistem ketenagakerjaan, fleksibilitas dalam hubungan industrial, serta perubahan dalam sistem pengupahan dan tunjangan.² Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur terkait dengan pengaturan waktu kerja, cuti, dan pengaturan kontrak kerja.

Bagi pengusaha, perubahan ini memberikan keleluasaan dalam mengatur tenaga kerja, diharapkan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Namun, bagi

¹ Gaol, R. I. L., Sianturi, A. F., Purba, B., Nasution, M., Damara, M. D., & Ramadhini, N. (2024). PENGARUH PENETAPAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI INDONESIA. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2).

² Hermawati, M., & Suwarsit, S. (2024). Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 156-167.

pekerja, kebijakan ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengurangan hak-hak mereka, terutama yang terkait dengan jaminan sosial dan upah yang adil. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan perburuhan yang baik harus mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja dan tetap memberikan insentif bagi dunia usaha.

Regulasi Investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja juga membawa perubahan signifikan dalam hal regulasi investasi. Dalam rangka menarik lebih banyak investasi, terutama dari luar negeri, kebijakan ini menyederhanakan prosedur perizinan dan mengurangi birokrasi yang sering menjadi hambatan bagi para investor. Salah satu langkah yang paling mencolok adalah pembentukan sistem perizinan berbasis risiko yang memungkinkan perizinan lebih cepat dan lebih mudah untuk sejumlah sektor usaha.

Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga memperkenalkan perubahan pada kebijakan terkait tanah dan sumber daya alam, yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperbaiki daya tarik investasi di sektor-sektor strategis. Perubahan-perubahan ini dirancang untuk meningkatkan aliran investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.³

Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi, beberapa kalangan mengkhawatirkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran aturan-aturan lingkungan dan sosial. Dikhawatirkan bahwa investor yang lebih dominan dapat mengabaikan aspek-aspek keberlanjutan dan dampak sosial ekonomi dari proyek-proyek yang dijalankan.

Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Jangka Pendek dan Panjang

Harmonisasi antara kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak yang sangat besar terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam jangka pendek, diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, yang pada gilirannya akan mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Perbaikan iklim investasi juga berpotensi mengurangi angka pengangguran, karena sektor-sektor yang menerima investasi cenderung membuka banyak lapangan pekerjaan.

Selain itu, dengan penyederhanaan regulasi dan birokrasi, Indonesia dapat mengurangi hambatan yang menghalangi percepatan pembangunan, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor industri. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan ini, agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada di lapangan.

Dalam jangka panjang, dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia, menjadikannya lebih tahan terhadap krisis global, dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Jika harmonisasi kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dapat berjalan dengan baik, Indonesia berpotensi untuk meningkatkan daya saingnya di tingkat global, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik. Namun, dampak jangka panjang dari kebijakan ini masih perlu diteliti lebih lanjut, karena banyak faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi hasil akhirnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar kebijakan ini benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang fokus pada analisis terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan yang mengatur kebijakan perburuhan dan regulasi investasi, serta bagaimana

³ Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, M. M. (2017). *Ekonomi pembangunan* (Vol. 1). Sah Media.

harmonisasi kedua kebijakan tersebut berpengaruh terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen hukum, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang mengutamakan kajian terhadap teks hukum untuk memahami konsep-konsep hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam konteks perekonomian Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Harmonisasi Kebijakan Perburuhan Dan Regulasi Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dapat Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Jangka Pendek

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sering disebut sebagai Omnibus Law, merupakan upaya besar dari pemerintah Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Undang-undang ini berfokus pada penyederhanaan berbagai regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi dunia usaha untuk berkembang.⁴ Dua kebijakan utama yang mendapat perhatian dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah kebijakan perburuhan dan regulasi investasi. Kedua kebijakan ini berfungsi untuk saling mendukung dalam menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para pelaku usaha dan tenaga kerja, yang pada gilirannya diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam jangka pendek.

Kebijakan Perburuhan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Sektor ketenagakerjaan di Indonesia menjadi salah satu isu penting yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu tujuan utama dari perubahan yang diusung oleh undang-undang ini adalah menciptakan fleksibilitas yang lebih besar di pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, kebijakan perburuhan di Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Beberapa ketentuan yang diubah atau disederhanakan dalam sektor ketenagakerjaan mencakup pengaturan mengenai hubungan kerja, upah, waktu kerja, dan sistem jaminan sosial. Salah satu perubahan penting adalah pemberlakuan sistem perjanjian kerja yang lebih fleksibel, yang memungkinkan pengusaha dan pekerja untuk lebih mudah beradaptasi dengan kondisi pasar tenaga kerja yang dinamis. Selain itu, ketentuan mengenai upah juga mengalami perubahan dengan memberikan ruang lebih bagi pengusaha untuk menyesuaikan besaran upah dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Dengan adanya fleksibilitas ini, diharapkan pengusaha tidak terbebani dengan beban biaya yang tinggi, yang sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Kebijakan ini juga memberi peluang bagi pekerja untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan, mengingat fleksibilitas yang diberikan kepada pengusaha dalam hal perekrutan tenaga kerja. Dengan pengurangan hambatan-hambatan dalam pasar tenaga kerja, perusahaan dapat lebih cepat melakukan ekspansi dan merekrut tenaga kerja, yang tentu saja akan meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Sebagai hasilnya, sektor perburuhan yang lebih efisien dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang berperan penting dalam mendorong permintaan domestik. Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan baik, tidak semua pihak sepakat dengan perubahan yang diusulkan. Beberapa kelompok buruh mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini akan mengurangi perlindungan hak-hak pekerja, seperti jaminan sosial, upah minimum, dan hak atas cuti. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan keseimbangan yang tepat antara fleksibilitas pasar tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja. Harmonisasi yang baik antara kedua aspek ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.

Regulasi Investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja

⁴ Hermawan, R., Said, M. K. A., Nugraha, A. S., Hidayat, D. R. D., & Siswajanthry, F. (2024). PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM UU CIPTA KERJA (KONFLIK ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERLANJUTAN EKOSISTEM). *Musyrtari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 9(9), 81-90.

Salah satu fokus utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Dalam rangka menarik lebih banyak investasi, terutama dari luar negeri, pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan mengurangi birokrasi yang selama ini dianggap sebagai hambatan bagi para investor. Salah satu langkah yang paling signifikan adalah pembentukan sistem perizinan berbasis risiko yang memungkinkan perusahaan untuk mengurus izin usaha dengan lebih cepat dan efisien.

Penyederhanaan perizinan ini dilakukan melalui beberapa kebijakan, seperti pengurangan izin yang tumpang tindih, pengaturan yang lebih jelas mengenai jenis izin yang dibutuhkan oleh suatu usaha, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses perizinan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan efisien, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang kemudahan dalam pengelolaan sumber daya alam, penyederhanaan izin lingkungan, serta pemangkasan berbagai ketentuan yang dirasa tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Semua perubahan ini diharapkan dapat mempermudah alur investasi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu efek langsung dari peningkatan investasi adalah penciptaan lapangan kerja baru yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, yang tentunya akan berkontribusi pada penurunan angka pengangguran.

Namun, meskipun kebijakan ini bertujuan baik, beberapa pihak khawatir bahwa pelanggaran regulasi terkait perizinan, terutama di sektor lingkungan dan sosial, dapat membawa dampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam implementasi regulasi investasi ini.

Pengaruh Harmonisasi Kebijakan Perburuhan dan Regulasi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Jangka Pendek

Harmonisasi antara kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam jangka pendek. Peningkatan daya tarik investasi melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan pengurangan hambatan administratif akan mempercepat masuknya modal ke Indonesia. Dengan meningkatnya investasi, sektor-sektor yang menerima aliran dana akan berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi lebih luas.⁵

Selain itu, penyederhanaan regulasi perburuhan yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam perekrutan dan pengaturan upah dapat mempercepat proses penciptaan lapangan kerja. Pengusaha akan lebih mudah menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasar, sementara pekerja akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, meskipun dengan status atau kondisi yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya.

Dengan meningkatnya aliran investasi dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat juga diperkirakan akan meningkat. Konsumsi domestik yang lebih tinggi akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur, yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Ini juga akan memperkuat pasar domestik dan menciptakan lingkaran yang saling mendukung antara investasi, pekerjaan, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak positif ini bergantung pada implementasi yang baik dan pengawasan yang efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengorbankan kualitas pekerjaan atau lingkungan, dan bahwa semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja, dapat merasakan manfaat yang adil dari perubahan kebijakan ini.

Harmonisasi kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam

⁵ Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Universitas Brawijaya Press.

jangka pendek. Penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan peningkatan daya tarik investasi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Namun, untuk mencapai dampak maksimal, perlu adanya keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak-hak pekerja dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha. Implementasi yang tepat dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci keberhasilan Undang-Undang Cipta Kerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Dampak Jangka Panjang Dari Harmonisasi Kebijakan Perburuhan Dan Regulasi Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Daya Saing Dan Keberlanjutan Ekonomi Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menjadi pusat perhatian bagi banyak kalangan, terutama dalam konteks perbaikan iklim usaha, penguatan daya saing, dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu aspek paling krusial dalam kebijakan ini adalah harmonisasi antara kebijakan perburuhan dan regulasi investasi, yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Meskipun perubahan tersebut dipandang sebagai langkah maju dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, dampak jangka panjang terhadap daya saing dan keberlanjutan ekonomi Indonesia memerlukan kajian yang lebih mendalam. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang tercakup dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat mempengaruhi struktur ekonomi, kompetitivitas Indonesia di pasar global, serta kemampuan negara untuk menjaga keberlanjutan ekonominya dalam menghadapi berbagai tantangan global yang mungkin muncul di masa depan.

a. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia

Salah satu tujuan utama dari harmonisasi kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk memperbaiki daya saing Indonesia dalam perekonomian global. Daya saing ekonomi yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing dan domestik, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor-sektor kunci seperti manufaktur, teknologi, dan infrastruktur. Dengan adanya penyederhanaan regulasi perburuhan dan investasi, Indonesia berharap untuk mengurangi hambatan administratif yang sering kali menjadi kendala bagi para investor. Hal ini diharapkan akan memberikan kesempatan lebih besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan berbagai sektor yang dapat berkontribusi pada ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

Namun, peningkatan daya saing tidak hanya bergantung pada kebijakan yang mendorong investasi, tetapi juga pada kemampuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan industri lokal. Oleh karena itu, penyederhanaan peraturan dan prosedur investasi melalui sistem perizinan berbasis risiko harus diimbangi dengan perlindungan terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing jangka panjang, seperti industri berbasis teknologi dan inovasi. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan yang tidak hanya menarik investasi, tetapi juga mendukung pengembangan industri yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan tuntutan pasar global.

Selain itu, fleksibilitas dalam ketenagakerjaan yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan tenaga kerjanya dengan kebutuhan pasar. Sistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel dapat mempermudah pengusaha dalam mengatur hubungan kerja dan memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja yang dinamis.⁶ Namun, untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan pekerja, penting bagi pemerintah untuk terus

⁶ Setioningtyas, W. P. (2016). Analisis Sistem Kerja Outsourcing Pada Tenaga Kerja Di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 21(1), 79-91.

memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja, terutama terkait dengan jaminan sosial, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman.

b. Pengaruh Terhadap Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, mengabaikan kesejahteraan sosial, atau mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang. Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, harmonisasi kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dapat membawa dampak signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi Indonesia jika diterapkan dengan bijak. Namun, di sisi lain, jika kebijakan ini hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan, maka dapat muncul potensi dampak negatif yang dapat merusak kestabilan ekonomi dalam jangka panjang.

Sebagai contoh, kemudahan yang diberikan kepada investor untuk memperoleh izin usaha dan melakukan kegiatan investasi bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor industri. Namun, tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas investasi yang tidak terkendali, Indonesia berisiko menghadapi masalah lingkungan seperti polusi, kerusakan ekosistem, dan ketimpangan sosial yang dapat merusak keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan investasi yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja perlu dipadukan dengan regulasi lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak merusak sumber daya alam Indonesia dan tidak menambah kesenjangan sosial yang sudah ada.

Di sisi lain, kebijakan perburuhan yang lebih fleksibel diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran, yang merupakan salah satu tantangan terbesar bagi ekonomi Indonesia. Akan tetapi, tanpa diiringi dengan kebijakan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang memadai, kebijakan ini dapat menciptakan tenaga kerja yang rentan terhadap pengangguran struktural, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel diimbangi dengan kebijakan pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, agar mereka dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

c. Meningkatkan Infrastruktur dan Pengembangan Sumber Daya Alam

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyederhanaan prosedur perizinan yang akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya. Pembangunan infrastruktur yang cepat dan efisien dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap daya saing ekonomi Indonesia. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi, mulai dari transportasi, energi, hingga teknologi informasi. Dengan adanya kemudahan dalam mendapatkan izin usaha dan pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur, Indonesia diharapkan dapat mempercepat pembangunan berbagai sektor yang dapat meningkatkan daya saingnya. Namun, perlu dicatat bahwa pengembangan infrastruktur yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam bisa berisiko menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa dalam proses harmonisasi kebijakan perburuhan dan investasi, aspek keberlanjutan lingkungan harus tetap dijaga, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan sosial di masa depan.

d. Perlunya Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Implementasi Kebijakan

Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing Indonesia, keberhasilan jangka panjang kebijakan ini sangat bergantung pada kualitas implementasinya. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara adil dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah harus memastikan bahwa perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan dan investasi tidak hanya

menguntungkan pihak pengusaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, evaluasi terus-menerus terhadap dampak kebijakan ini terhadap perekonomian Indonesia perlu dilakukan, baik dalam aspek ekonomi makro maupun mikro. Evaluasi ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, serta keberlanjutan ekonomi. Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang sudah diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi Indonesia.⁷

Harmonisasi kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak yang besar terhadap daya saing dan keberlanjutan ekonomi Indonesia. Dalam jangka panjang, jika diterapkan dengan bijak, kebijakan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global, meningkatkan daya saing industri, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, untuk mencapai hasil tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, pengawasan yang ketat terhadap dampak lingkungan, serta kebijakan pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang tepat, Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

D. KESIMPULAN

Jadi, harmonisasi kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Penyederhanaan perizinan dan fleksibilitas dalam ketenagakerjaan yang diperkenalkan oleh kebijakan ini dapat menarik lebih banyak investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global, serta mendukung sektor-sektor kunci seperti manufaktur dan teknologi untuk berinovasi dan bersaing secara internasional. Meskipun demikian, dampak jangka panjang dari kebijakan ini tetap bergantung pada implementasi yang hati-hati, dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan keberlanjutan sosial-ekonomi.

Namun, keberlanjutan ekonomi Indonesia dalam menghadapi perubahan kebijakan ini memerlukan perhatian terhadap beberapa tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan sosial. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan kemudahan berusaha, pengawasan yang ketat terhadap dampak sosial dan lingkungan dari investasi harus tetap menjadi prioritas. Kebijakan yang tidak memperhatikan dampak jangka panjang terhadap sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat dapat merusak keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan ini, memastikan bahwa harmonisasi antara kebijakan perburuhan dan regulasi investasi dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ekonomi Indonesia.

⁷ Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Prespektif Kebijakan Publik. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 257-267.

E. DAFTAR PUSTAKA

Literatur Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Jurnal :

Gaol, R. I. L., Sianturi, A. F., Purba, B., Nasution, M., Damara, M. D., & Ramadhini, N. (2024). PENGARUH PENETAPAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI INDONESIA. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2).

Hermawati, M., & Suwarsit, S. (2024). Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 156-167.

Utama, A. N., Kesuma, P. T., & Siswajanthi, F. (2024). GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) SEBAGAI SENJATA AMPUH UNTUK KONSUMEN MELAWAN PELAKU USAHA CURANG. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(6), 61-70.

Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, M. M. (2017). *Ekonomi pembangunan* (Vol. 1). Sah Media.

Hermawan, R., Said, M. K. A., Nugraha, A. S., Hidayat, D. R. D., & Siswajanthi, F. (2024). PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM UU CIPTA KERJA (KONFLIK ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERLANJUTAN EKOSISTEM). *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 9(9), 81-90.

Setioningtyas, W. P. (2016). Analisis Sistem Kerja Outsourcing Pada Tenaga Kerja Di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 21(1), 79-91.

Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Prespektif Kebijakan Publik. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 257-267.